

ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DESA PADA PERANGKAT DESA PAREREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR

Rossa Ilma Silfiah¹, Munawaroh², Aminullah³

Universitas Yudharta Pasuruan

Correspondent author: rossa@yudharta.ac.id aminullah@yudharta.ac.id

Pasuruan, Jawa Timur - Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the Performance Analysis Of Village Government Bureaucracies In The Development Of Parerejo Village, Purwodadi District, Pasuruan District, East Java. This study uses a descriptive qualitative research method. The results of this study are based on indicators in Agus Dwiyanto's theory (2006: 50) regarding the measurement of the performance of the public bureaucracy as follows: (1) the performance of the Parerejo Village Government Bureaucracy has fulfilled the Productivity aspect due to work achievements by maximizing massive organizational evaluation. (2) The performance of the Parerejo Village Bureaucracy has fulfilled the Service Quality aspect because it has SOP as a public service mechanism. (3) The performance of the Parerejo Village Bureaucracy has fulfilled the Responsiveness aspect because it makes community complaints material for organizational evaluation in improving the quality of performance. (4) The Bureaucratic Performance of Parerejo Village has fulfilled the Responsibility aspect because it opens the widest possible forum for public participation. (5) The performance of the Parerejo Village Bureaucracy has met the Accountability aspect because it opens a public participation forum through a Joint forum or media portal as a form of Village Government accountability to the Community.

Keywords: Bureaucracy; Performance Analysis; Village Government

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintahan Desa Pada Perangkat Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah berdasar pada indikator dalam teori Agus Dwiyanto (2006: 50) tentang pengukuran kinerja birokrasi public adalah sebagai berikut: (1) kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Parerejo telah memenuhi aspek Produktivitas karena adanya pencapaian kerja dengan memaksimalkan evaluasi organisasi secara massif. (2) Kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek Kualitas Layanan karena memiliki SOP sebagai mekanisme pelayanan publik. (3) Kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek Responsivitas karena menjadikan complain masyarakat sebagai bahan evaluasi organisasi dalam meningkatkan kualitas kinerja. (4) Kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek Responsibilitas karena membuka forum partisipasi public seluas-luasnya. (5) Kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek Akuntabilitas karena membuka forum partisipasi public melalui forum Bersama ataupun portal media sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Kinerja; Birokrasi; Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Birokrasi dalam perspektif Weber meletakkan efisiensi sebagai norma birokrasi, karena itu untuk meningkatkan efisiensi sistem pembagian kerja dalam birokrasi dikembangkan melalui spesialisasi kerja yang jelas. Pengembangan birokrasi dilakukan baik secara vertikal (hirarkis) ataupun secara horizontal dalam organisasi. Birokrasi juga harus memiliki aturan yang jelas yang mengatur hubungan kerja secara impersonal. Jabatan-jabatan di birokrasi diisi oleh orang-orang yang secara teknis berkompeten atau profesional dibidangnya. Pola rekrutmen dan promosi pegawai dalam birokrasi didasarkan pada aturan formal. Para pegawai (birokrat) memandang tugas sebagai karier seumur hidup dan mendapatkan kompensasi (gaji) dari tugas yang dilaksanakan. (Bakti et al., 2018)

Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Hal ini berarti mampu untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, dan aspiratif terhadap sebagai tuntutan masyarakat yang di layani.

Menurut Weber dalam (Bakti, Ode, & Elwan, 2018), Sumber legitimasi dari birokrasi berasal dari aturan yang berlaku (legalitas formal). Dalam konsep Weber birokrasi sebagai aparat administratif mempunyai peran yang menentukan tumbuh dan berkembangnya organisasi tersebut, sehingga perhatian Weberian ini lebih kepada struktur (birokrasi) yang telah diatur secara normatif dan mekanisme untuk mempertahankan struktur tersebut untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. (Bakti et al., 2018)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, yang mengatur tentang penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya penetapan SKP tentang perilaku kerja. SKP, juga dikenal sebagai target kinerja karyawan, harus disesuaikan berdasarkan perbandingan keberhasilan aktual dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan-tujuan ini dibagi menjadi lima indikator terpisah, yaitu; (a) Pelayanan (b) Komitmen (c) Inisiatif kerja (d) kerja sama (e) kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan oleh Munawi Gay dan Eka Adriana tahun (2019) dengan judul penelitian "Kinerja Birokrasi dalam Pemberian Pelayanan Publik kepada Masyarakat pada Kantor Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene" menunjukkan bahwa penggunaan ADD dalam penyusunan rencana kerja pembangunan kurang maksimal. Pengelolaan dana desa dari konteks perencanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilakukan dengan baik, namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat meskipun dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat cukup baik. Kendala yang ditemukan diantaranya; pencairan dana kurang tepat waktu sehingga pelaksanaannya juga mundur; sering terjadi pergantian pengurus dan pekerja sehingga pelaksanaan pekerjaan terganggu. Indikator pengukuran

kinerja birokrasi publik yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006 : 50) mencakup lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Tingkat keberhasilan tentunya melewati banyak proses yang mana di dalam terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam kinerja yang tentunya perihal tersebut sangat mempengaruhi dalam kinerja perangkat. Berdasar pada problem yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintahan Desa Pada Perangkat Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan tujuan untuk melihat bagaimana Kinerja Birokrasi Pemerintahan Desa Parerejo beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perubahan pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi. (Moeleong 2009 : 5). Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Parerejo sebagai informan kunci kemudian dikembangkan sesuai penelusuran data yang dibutuhkan. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kinerja Birokrasi Pemerintahan Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini ialah Observasi yang diteliti. Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan mengetahui Kualitas Pelayanan Administrasi Melalui Program Kios E-Pakladi di Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi beserta faktor yang mempengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian lapangan, peneliti mencoba untuk melihat bagaimana kinerja Birokrasi Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. secara umum kinerja Birokrasi Pemerintah Desa sudah maksimal dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung maupun penghambat dari kinerja birokrasi

tersebut. Mulai dari SDM individu Pemerintah Desa, sistem yang harus terus dievaluasi didalamnya hingga pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam melihat bagaimana kinerja Birokrasi pemerintah Desa Parerejo. Dalam penelitian Kali ini, peneliti mencoba melihat bagaimana kinerja Birokrasi Desa Parerejo menggunakan teori dari Agus Dwiyanto (2006: 50) tentang pengukuran kinerja birokrasi publik yang mana berdasarkan dengan adanya indikator sebagai berikut:

Produktivitas dalam Kinerja Birokrasi Desa Parerejo

Dalam meningkatkan produktivitas kinerja Birokrasi Desa Parerejo Kepala Desa terus melakukan evaluasi kinerja, pengembangan SDM, serta pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang Kinerja Birokrasi Desa Parerejo. Artinya dengan adanya peningkatan kualitas SDM Birokrasi Pemerintah Desa Parerejo menunjukkan bahwa kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Parerejo telah memenuhi aspek *Produktivitas* karena adanya pencapaian kerja dengan memaksimalkan evaluasi organisasi secara massif.

Kualitas Pelayanan dalam Birokrasi Desa Parerejo

Dalam meningkatkan kualitas layanan public adalah dengan adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) yang didalam SOP itu terdapat bagaimana mekanismen pelayanan kepada masyarakat baik secara administratif maupun secara sikap dalam merespon keinginan masyarakat. Artinya dengan adanya SOP pelayanan ini, kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek *Kualitas Layanan* karena memiliki SOP sebagai mekanisme pelayanan publik.

Responsivitas dalam Kinerja Birokrasi Desa Parerejo

Secara singkat responsivitas disini memilih dalam keselarasan antara program dan aktivitas pelayanan menggunakan kebutuhan. Responsivitas dimasukkan menjadi salah satu indikator kinerja dikarenakan responsivitas secara eksklusif mendeskripsikan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan hasil observasi maupun wawancara, bukti fisik tentang bagaimana kinerja Birokrasi Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi bahwa dalam meningkatkan Responsivitas adalah dengan terus melakukan perbaikan berdasarkan pada apa yang menjadi complain masyarakat terhadap kinerja birokrasi Desa Parerejo. Artinya, dengan adanya hal tersebut, kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek *Responsivitas* karena menjadikan complain masyarakat sebagai bahan evaluasi organisasi dalam meningkatkan kualitas kinerja.

Responsibilitas dalam Kinerja Birokrasi Desa Parerejo

Responsibilitas mengungkapkan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan secara sinkron dengan prinsip-prinsip administrasi yang sah atau sesuai dengan menggunakan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun juga implisit. Dimensi menurut responsibilitas merupakan daya tanggap, produktivitas, ketetapan saat dan disiplin

kerja. Responsibilitas memiliki arti mengenai pelaksanaan aturan yang sesuai prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terkait perundang-undangan tanggung jawab sosial masyarakat dan lingkungan (Aminullah and Nuzil, 2018). Berdasarkan hasil observasi maupun wawancara, bukti fisik tentang bagaimana kinerja Birokrasi Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi bahwa dalam meningkatkan Responsibilitas adalah dengan membuka ruang untuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musrembangdes atau forum musyawarah yang lain. Sedangkan dalam hal produktivitas dan disiplin kerja Birokrasi Desa Parerejo mempunyai SOP yang menjadi acuan Birokrasi Pemerintah Desa Parerejo dalam menjalankan mekanisme kerja di Pemerintahan desa Parerejo. Artinya, dengan adanya hal tersebut, kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek *Responsibilitas* karena membuka forum partisipasi public seluas-luasnya.

Akuntabilitas dalam Kinerja Birokrasi Desa Parerejo

konsep dasar akuntabilitas publik mampu digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan aktivitas organisasi publik itu konsisten menggunakan kehendak banyak orang. Dimensi menurut akuntabilitas merupakan akuntabilitas aturan dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas acara, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas financial. Berdasarkan hasil observasi maupun wawancara, bukti fisik tentang bagaimana kinerja Birokrasi Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi bahwa dalam meningkatkan Akuntabilitas adalah dengan membuka ruang untuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musrembangdes atau forum musyawarah yang lain seperti melalui portal Pemerintah Desa, Sistem Informasi Manajemen, dan Platform Daring untuk melaporkan keluhan atau masukan. Artinya, dengan adanya hal tersebut, kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek *Akuntabilitas* karena membuka forum partisipasi public melalui forum Bersama ataupun portal media sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakat.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Birokrasi Desa Parerejo

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja atau tinggi rendahnya kinerja dari Aparatur sipil Negara tergantung dari faktor-faktor yang sangat mempengaruhi. Adapun faktor pendukung Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Parerejo adalah sebagai berikut : (1) Perkembangan teknologi menjadikan kinerja Birokrasi Desa Parerejo semakin cepat dan (2) Adanya portal media dengan berbagai kanal memudahkan Pemerintah Desa dalam menyampaikan Informasi perihal Desa kepada masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dari kinerja Birokrasi Desa Parerejo adalah SDM pengelolaan Organisasi Pemerintahan Desa Parerejo yang harus terus ditingkatkan guna mencapai pelayanan publik yang prima sesuai dengan keinginan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) kinerja Birokrasi Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. (2) secara umum kinerja Birokrasi Pemerintah Desa sudah maksimal dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Secara lebih rinci, peneliti berdasar pada indikator dalam teori Agus Dwiyanto (2006 : 50) tentang pengukuran kinerja birokrasi publik yang mana berdasarkan dengan adanya indikator sebagai berikut :

1. adanya peningkatan kualitas SDM Birokrasi Pemerintah Desa Parerejo menunjukkan bahwa kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Parerejo telah memenuhi aspek *Produktivitas* karena adanya pencapaian kerja dengan memaksimalkan evaluasi organisasi secara massif.
2. Dengan adanya SOP pelayanan ini, kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek *Kualitas Layanan* karena memiliki SOP sebagai mekanisme pelayanan publik.
3. Kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek *Responsivitas* karena menjadikan complain masyarakat sebagai bahan evaluasi organisasi dalam meningkatkan kualitas kinerja.
4. Kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek *Responsibilitas* karena membuka forum partisipasi public seluas-luasnya.
5. Kinerja Birokrasi Desa Parerejo telah memenuhi aspek *Akuntabilitas* karena membuka forum partisipasi public melalui forum Bersama ataupun portal media sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakat.

Adapun yang menjadi faktor pendukung kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Parerejo adalah:

1. Perkembangan teknologi menjadikan kinerja Birokrasi Desa Parerejo semakin cepat;
2. Adanya portal media dengan berbagai kanal memudahkan Pemerintah Desa dalam menyampaikan Informasi perihal Desa kepada masyarakat.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dari kinerja Birokrasi Desa Parerejo adalah SDM pengelolaan Organisasi Pemerintahan Desa Parerejo yang harus terus ditingkatkan guna mencapai pelayanan public yang prima sesuai dengan keinginan masyarakat.

REFERENSI

- Aminullah and Nuzil, N.R. (2018) 'Implementasi Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan)', *Sketsa Bisnis*, 5(2), pp. 123–132. <https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3289>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & rochim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Bakti, O. :, Ode, L., & Elwan, M. (2018). *ANALISIS RESTRUKTURISASI BIROKRASI DALAM PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE PADA SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA*. 1 (3), 1–13. Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service; Serving Not Steering*. New York: ANSI.
- Dwi Christina, I. S. (n.d.). *KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINOMPO KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA*.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Indradi, S. S. (2007). *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional Malang.
- Lynn, Laurence E. 2006. *Public Management: Old and New*. Routledge. New York dan London.
- Lynn, Laurence E. Jr. 1996. *Public Management as Art, Science, and Profession*. Chatham, NJ: Chatham House.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFY Yogyakarta: Yogyakarta
- Miles, M., A.M. Huberman, and J. Saldana. 2014. *Qualitative data analysis A methods sourcebook*. Edisi ke-3. America: Sage publications.
- Moeleong, Lexy J. 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roskadaya Offset.
- Munawi Gay, E. A. (2019). *KINERJA BIROKRASI DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT PADA KANTOR KELURAHAN MALUNDA KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE*. *MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 45-56.
- Muhammad. (2018). *Birokrasi (Kajian Konep, Teori Menuju Good Governance)*. *Unimal Press*, 53(9), 1689–1699.
- Ott, J. Steven, Hyde, Albert C & Shafritz Jay M. (1990) *Public Management: The Essential Readings*. Chicago, Lyceum Books/Nelson-Hall ... London, Heinemann Rainey, Hal G., & Chun Young H. (2005) *Public and private management compared*.
- Perseda, Wasistiono, S, "Pola Pendelegasian Wewenang dan Hubungan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kecamatan", Makalah, Pusat Kajian Pemerintah STPDN, Yousa, Amri, 2002, "Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah : Desain Model dan
- Priambodo, A. (2019). *Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Otonomi Desa*. *Jurnal Manajemen, Keuangan, dan Komputer*, 32-42.

-
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Shafritz, J. M., Russell, E. W., Borick, C. P., & Hyde, A. C. (2017). *Introducing Administration Public*. Taylor & Prancis: Abingdon.
- Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Bandung : PT. Refika Aditama 2007) h. 257
- Syafili, Inu Kencana, 2003, Ilmu Administrasi publik, Rineka Cipta, Jakarta. Surakhmat, W,1982, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung.The Liang Gie, 1992, Ensiklopedi Administrasi, Gunung
- Tsauri, S. (2014). MANAJEMEN KINERJA Performance Management. In *STAIN Jember Press*.
- ZAHRA, H. (2022). *Implementasi New Public Management (Npm) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember*.